

BAB II

PERKEMBANGAN WACANA PEMBANGUNAN GLOBAL

Para pemimpin negara telah menyusun beragam agenda pembangunan baik di tingkat nasional maupun global. Berbagai macam formula dengan fokus dan solusi yang berbeda telah dirancang untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Agenda pembangunan yang diadopsi mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan global, selanjutnya memunculkan berbagai tanggapan baik itu berupa dukungan ataupun kritikan yang selanjutnya akan dipaparkan dalam bab berikutnya, khususnya tanggapan dari Wangari Maathai terhadap agenda pembangunan global.

Namun sebelumnya, agar pemaparan pada bab tersebut lebih mudah dipahami, dirasa sangat perlu untuk terlebih dahulu mengetahui perkembangan agenda pembangunan yang selama ini telah disusun. Maka dari itu, pada bab ini penulis akan memaparkan perkembangan wacana pembangunan global yang terus dikembangkan oleh negara-negara di dunia sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan global.

A. Isu Pembangunan dan Hubungan Antar Negara

Hingga akhir Perang Dingin, hubungan internasional cenderung diwarnai dengan isu- *high politic*, seperti perang, agresi militer, perluasan teritorial dan lain- lain. Dalam isu ini, negara merupakan aktor yang berperan dominan. Namun, seiring dengan adanya globalisasi yang didorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, mengakibatkan hubungan antar negara menjadi semakin kompleks dan mengakibatkan terjadi pergeseran tren dalam isu- *high politic* hubungan internasional. Kini, isu- *high politic* tersebut bergeser mengarah pada isu- *low politic*, seperti isu lingkungan, kemiskinan, kesenjangan, kesehatan dan lain-

lain. Negara tidak lagi menjadi satu- satunya aktor dalam hubungan internasional. Kini telah muncul aktor- aktor lain seperti organisasi internasional, NGO, MNC dan lain- lain.

Pergeseran isu tersebut telah memberi pengaruh terhadap bergesernya konsep keamanan dalam hubungan antar negara. Konsep keamanan tradisional telah meluas menjadi keamanan yang bersifat non-tradisional. Konsep keamanan pada awalnya hanya berkaitan dengan ancaman keamanan yang mengancam negara dan hanya menitik beratkan pada kemampuan negara tersebut dalam mempertahankan wilayahnya dari negara lain atau kelompok- kelompok yang menentang keberadaan negara tersebut dari segi militer. Dapat dikatakan sumber- sumber ancaman keamanan tradisional secara umum berasal dari ancaman militer. Dengan demikian, jika negara ingin aman, maka negara tersebut harus meningkatkan kemampuan militernya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Setelah Perang Dingin berakhir, isu keamanan mulai bergeser ke arah keamanan non-tradisional. Keamana tidak hanya menitik beratkan pada keamana negara saja, namun diperluas hingga ke lingkup individu (*human security*). Oleh karena itu, acaman dari keamanan-pun meluas hingga mencakup ancaman non-militer seperti kelaparan, kemiskinan, kesenjangan, kekeringan dan ancaman lainnya. Secara umum, dimensi dari keamanan ini melingkupi keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keaman kesehatan dan keamanan lain yang mengikat individu.³⁰

Dapat kita lihat, ketika kondisi dari sebuah negara stabil dan hak masyarakat dihargai dan terpenuhi, pemerintah di negara itu lebih memilih untuk berinvestasi untuk kesejahteraan masyarakatnya dan bukan untuk meningkatkan kekuatan militernya. Pemerintah lebih memilih untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, memberikan pelatihan, pengadaan

³⁰ Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu- Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

teknologi untuk pengembangan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas kesehatan daripada menambah jumlah senjata. Hal tersebut membuat masyarakat merasa lebih aman dan tidak tertekan.³¹

Konsep keamanan yang awalnya hanya ditafsirkan secara sempit, selanjutnya ditafsirkan lebih luas. Keamanan yang awalnya hanya sebatas keamanan negara, sekarang lebih dikaitkan dengan keamanan individu. Hal itu menjadikan hubungan antar negara mengalami perubahan. Hubungan tersebut tidak lagi hanya sebatas terkait isu militer saja, namun mencakup isu yang lebih luas, seperti dalam isu kesehatan, isu lingkungan, isu pangan, isu pendidikan atau secara umum mengenai isu pembangunan.

Pembangunan telah menjadi perhatian utama dari setiap negara setelah keamanan individu menjadi bagian yang penting dari kesejahteraan suatu negara. Kaitannya dengan hal itu, setiap negara memiliki tantangan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menjalankan pembangunan. Semakin beragamnya tantangan pembangunan, menjadi dirasa penting untuk saling melakukan kerjasama secara global dalam menjalankan pembangunan. Hal ini mendorong negara-negara saling berkomitmen untuk menyusun sebuah agenda pembangunan global yang berisikan formula-formula pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan global yang menjadi tantangan utama bagi setiap negara di dunia. Dengan demikian, seperti yang dikatakan Mahbub ul Haq – ekonom dari Pakistan - bahwa ketika ingin mengurangi ketidakesetaraan dalam suatu negara sangat penting untuk saling bekerja sama dalam menanganai permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan pembangunan baik di lingkup

³¹ Maathai, W. (2005). Inaugural World Food Law Distinguished Lecture - Howard University, Washington, DC - May 10, 2005. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/inaugural-world-food-law-distinguished-lecture%0A>

negara maupun global.³² Kerja sama dianggap semakin penting ketika muncul permasalahan pembangunan yang memiliki dampak yang mengglobal, seperti perubahan iklim yang dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia.

B. Konesus Washington: Sejarah dan Implikasi Bagi Pembangunan Global

Pada awalnya, tujuan dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan perekonomian dan mengejar ketertinggalan dari negara- negara yang sudah maju terlebih dahulu. Sehingga, pembangunan awalnya sering dikaitkan dengan istilah modernisasi dan industrialisasi. Di masa ini, pembangunan hanya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai alat untuk mengukur kesuksesan pembangunan yang telah dilakukan. Sebuah negara dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)* dan Produk Domestik Brutto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* sebagai alat ukur produktifitas masyarakat setiap tahun dalam pembangunan yang dilaksanakan. Kaitannya dengan hal itu, pembangunan dapat diartikan secara sederhana sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau negara.³³

Model pembangunan ini sangat membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti ketika terjadi permasalahan keuangan yang menimpa negara- negara Amerika Latin yang mengakibatkan defisit di tahun 1980an akibat hutang domestik yang berlebihan. Formula pembangunan yang mengarah pada kebijakan fiskal sangat

³² Baru, S. (1998). Mahbub ul Haq and Human Development: A Tribute. *Economic and Political Weekly*, 33(35), 2275–2279. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/440712>

³³ Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

dibutuhkan sebagai sebuah saran dalam menyusun kebijakan dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini menjadikan Konsensus Washington muncul sebagai formula yang tepat dalam mengatasi permasalahan itu. Sepuluh kebijakan yang ada dalam konsensus tersebut menjadi saran yang dianut negara-negara Amerika Latin untuk menangani permasalahan ekonomi disana. Peristiwa tersebut menjadikan konsensus itu berperan besar dalam pembangunan Amerika Latin.

Dipicu kegagalan pemerintah yang semakin luas dalam mengelola kegiatan ekonomi, Konsensus Washington berupaya melakukan stabilisasi melalui kebijakan dalam penyesuaian struktural, yang direkomendasikan oleh organisasi Bretton Woods dan Badan Ekonomi Amerika Serikat. Secara retorik, konsensus ini melibatkan keterikatan ideologi neo-liberal universalis yang mendukung pasar bebas dan mencurigai negara sebagai sumber masalah dalam pembangunan seperti adanya korupsi dan kebijakan yang tidak efisien. Konsensus ini lebih menekankan pada kebijakan yang terkait ekonomi makro, nilai tukar mata uang yang lebih kompetitif, privatisasi, liberalisasi keuangan dan perdagangan serta deregulasi.³⁴ Hal ini dikarenakan dalam Konsensus Washington, pembangunan merupakan hasil dari seperangkat insentif dan kebijakan ekonomi neoklasik, termasuk pengekanan fiskal, privatisasi, penghapusan intervensi pemerintah dalam penentuan harga barang, adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan liberalisasi pada perdagangan, keuangan, dan modal.³⁵

Konsensus Washington merupakan sebuah kumpulan kebijakan yang disusun untuk mengatasi krisis yang melanda negara-negara sedang berkembang di tahun 1980an. Konsensus yang dikenalkan oleh John Williamson, ekonom dari Institute for International Economics - sebuah *think tank group* di

³⁴ Yustika, A. E. (2004). Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, Dan Rintangan Politik. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(1), 1–14.

³⁵ Saad-Filho, A. (2010). *Growth, poverty and inequality: From Washington Consensus to inclusive growth. Working Papers* (Vol. 60). New York. Retrieved from http://www.un.org/esa/desa/papers/2010/wp100_2010.pdf

Washington D.C., merupakan ringkasan dari tema- tema yang diusung dari kebijakan- kebijakan ekonomi lembaga yang berada di Washington seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan U.S. Treasury Department. Setiap kebijakan yang terdapat pada konsesus tersebut merupakan formula yang baik untuk mendorong pembangunan dan memiliki fokus pada kebutuhan dalam menciptakan kebijakan fiskal, khususnya ekonomi makro. Oleh karena itu, menurut Williamson, konsensus yang terdiri dari sepuluh kebijakan ini merupakan daftar kebijakan yang diperlukan negara- negara di Amerika Latin dalam mengatasi permasalahan ekonomi mereka.³⁶

Berikut merupakan sepuluh kebijakan Konsesus Washington yang Williamson sampaikan sebagai rekomendasi dalam membuat kebijakan pembangunan:

1. Mengatur kebijakan fiskal secara disiplin dengan menghindari defisitnya pendapatan negara terhadap GDP;
2. Menata kembali prioritas pengeluaran publik, seperti pengelolaan subsidi dalam penyediaan pelayanan pendidikan, perawatan kesehatan dan investasi infrastruktur;
3. Perdagangan bebas, seperti liberalisasi ekspor dan impor yang menekankan pada kemudahan hingga penghilangan hambatan tarif maupun non tarif;
4. Liberalisasi terhadap investasi asing (*foreign direct investment*);

³⁶ Williamson, J. (2004). *Institute for International Economics. All rights reserved.*

5. Privatisasi perusahaan nasional;
6. Deregulasi peraturan pemerintah. Dalam hal ini bukan untuk menghapuskan peraturan yang telah dibuat, namun lebih untuk melunakkan hambatan- hambatan yang menjadi penghalang dalam memasuki pasar. Namun, deregulasi tersebut tidak akan dilakukan jika mengganggu stabilitas pasar dan konsumen serta pengawasan terhadap lembaga keuangan;
7. Reformasi pajak, memperluas basis pajak dan menerapkan tarif pajak marjinal yang moderat;
8. Suku bunga yang ditentukan pasar;
9. Nilai tukar yang kompetitif;
10. Perlindungan hukum untuk hak kepemilikan.

Secara umum, isi dari konsesus tersebut terdiri atas empat elemen. Pertama, hegemoni dari teori neoklasik modern dalam pembangunan ekonomi. Teori neoklasik, secara umum, berasumsi bahwa pasar lebih efisien dari pada negara dalam menjalankan pembangunan. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa pasar lebih baik dari pada negara dalam menangani permasalahan pembangunan, seperti pertumbuhan industri, persaingan internasional dan permasalahan tenaga kerja. Dari peristiwa itu, dapat kita lihat bahwa terdapat kecenderungan pergeseran paradigma dalam memandang aktor utama yang berperan dalam pembangunan yang awalnya *state-led development* ke arah *market-driven development* secara radikal. Hal ini mengakibatkan peran dari negara memudar dan

secara meyakinkan peran tersebut akan digantikan oleh peran aktor- aktor non-teritorial yang semakin banyak.³⁷

Kedua, konsesus ini melihat bahwa penyebab dari kemiskinan yang dialami masyarakat adalah berasal dari kesalahan negara itu sendiri, seperti korupsi, adanya inefisiensi kebijakan dan kurang tepatnya pemberian insentif ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terdiri atas seperangkat insentif dan kebijakan ekonomi neoklasik yang tepat sasaran, termasuk pengekangan fiskal, privatisasi, penghapusan intervensi pemerintah dalam pasar, meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan liberalisasi dalam perdagangan, keuangan, dan modal. Ketiga, konsesus ini menekankan pada keuntungan yang akan didapatkan dari pasar. Oleh karena itu, pengamanan ekonomi pasar menjadi hal sangat penting dilakukan oleh negara agar mendapatkan keuntungan dari pasar. Bila perlu, negara harus mengerahkan aturan, hukum dan militer demi keamanan ekonomi pasar.

Keempat, kaitannya dengan Bank Dunia dan IMF, Konsensus Washington digunakan sebagai agenda untuk melakukan studi dalam pembangunan. Oleh karena itu, Bank Dunia dan IMF akan menerapkan beberapa standar dalam pembangunan melalui persyaratan yang dibebankan kepada negara- negara miskin yang sedang mengalami krisis keuangan atau krisis fiskal.³⁸

Konsesus Washinton dapat kita lihat sebagai salah satu model pembangunan yang lebih memfokuskan tujuannya pada peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dan pasar menjadi hal yang penting dalam kesuksesan agenda pembangunan ini. Hal ini merupakan cara agar negara- negara mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan mengejar ketertinggalan dari negara- negara maju. Tidak

³⁷ Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu- Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

³⁸ Ibid.

mengerankan jika model pembangunana ini sering dikaitkan dengan istilah liberalisasi pasar.

C. Dari MDGs ke SDGs

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan, agenda pembangunan dengan tolok ukur pertumbuhan ekonomi dianggap belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi negara yang menjalankannya. Sebaliknya, agenda tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan, seperti krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pangan yang parah dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Hal ini terutama sering dialami oleh negara-negara dunia ketiga.

Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting bagi suatu negara. Namun secara umum, ada tiga unsur pokok yang terdapat dalam permasalahan global sebagai akibat pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Ketiga unsur tersebut adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan kekerasan komunal. Lebih sederhananya, pertumbuhan ekonomi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi krisis global.³⁹

Ketika produktivitas masyarakat sudah tinggi, masih dirasa kurang berhasil ketika pembangunan tidak melihat pentingnya pemerataan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat. Kesuksesan dari sebuah pembangunan memang didapatkan, namun kesuksesan itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Oleh karena itu, perlu untuk ditambahkan sebuah tolok ukur baru dalam mengukur sebuah pembangunan, yaitu aspek keadilan sosial. Hal tersebut menjadi faktor yang penting untuk memastikan pembangunan dapat berlangsung dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata.⁴⁰

³⁹ Jemadu, A. (2003). Pembangunan Dan Modernisasi: Implikasinya Terhadap Tatanan Ekologi Dan Sosial. *JAP*, 2003(2), 222–234.

⁴⁰ Opcit.

Seperti yang diungkapkan oleh Mahbub Ul Haq, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting, khususnya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Namun, kehidupan manusia tidak sepenuhnya akan bergantung pada ekonomi saja. Oleh karena itu, pembangunan harus lebih dari sekadar perluasan pendapatan dan kekayaan saja. Kesejahteraan dapat dicapai ketika negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menyediakan kebutuhan sosial secara merata, seperti penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Dengan demikian, para pengambil kebijakan perlu memperhatikan pentingnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sehingga kebijakan yang diambil akan fokus berkontribusi pada pengembangan manusia untuk mengatasi kemiskinan. Selanjutnya, pembangunan mampu menyediakan lingkungan bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang umur, sehat dan kreatif.⁴¹

Namun, tantangan pembangunan belum sepenuhnya selesai. Muncul kekhawatiran lainnya akan pembangunan global yang dilakukan. Pasca Perang Dunia II, hampir setiap negara fokus menata pembangunan nasional mereka. Pembangunan secara umum mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, dibalik pesatnya pembangunan tersebut, terdapat hal yang terlupakan, yakni kesehatan lingkungan yang kualitasnya dari waktu ke waktu semakin memburuk. Jika hal itu dibiarkan secara terus-menerus, maka kesejahteraan global tidak dapat dicapai secara keberlanjutan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar di semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perhatian khusus terhadap dimensi lingkungan. Hal ini dapat diawali dengan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk mengkaji hubungan antara lingkungan dan pembangunan serta melakukan kerjasama global untuk mengatasi permasalahan

⁴¹ Baru, S. (1998). Mahbub ul Haq and Human Development: A Tribute. *Economic and Political Weekly*, 33(35), 2275–2279. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/4407121>

lingkungan, khususnya ketika menjalankan pembangunan global.

1. Tujuan Pembangunan Milenium/ *Millennium Development Goals (MDGs)*

Pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan sebuah konvensi tingkat tinggi yang sering disebut dengan KTT Bumi. Pertemuan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro ini, digagas untuk menyatukan pandangan para pemimpin negara tentang kelestarian lingkungan dan pelaksanaan pembangunan. Konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni hingga 14 Juni 1992 ini, diikuti oleh kepala negara dan perwakilan negara atau pemerintah serta organisasi- organisasi internasional non-pemerintah dari seluruh dunia. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, seperti Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Agenda 21 dan lain- lain. Selain itu, konferensi ini juga menjadi dorongan bagi negara- negara untuk senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan dalam memutuskan sebuah kebijakan, khususnya dalam pembangunan.

Pada tanggal 6 sampai 8 September 2000, negara- negara anggota PBB menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera dan adil serta sekaligus menindak lanjuti kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT Bumi 1992. Mereka sadar bahwa dalam mengatasi tantangan global, diperlukan kebijakan pada tingkat global agar pengaruh dari globalisasi mampu menjadi dorongan positif bagi semua masyarakat di dunia. Tantangan global merupakan tanggung jawab dari semua negara di dunia, diperlukan usaha yang keras dan berkelanjutan demi menciptakan kesempatan yang menyeluruh dan adil dalam globalisasi. Sangat diperlukan partisipasi yang efektif dari semua negara dalam merancang dan melaksanakan sebuah agenda pembangunan global. Oleh karena-nya, pada kesempatan itu negara- negara anggota PBB

berkumpul di markas PBB di New York dan menyepakati sebuah piagam yang diberi nama Deklarasi Milenium.

Piagam tersebut, merupakan sebuah pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan menegaskan komitmen negara- negara anggota PBB untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera dan adil. Selain itu, dalam piagam tersebut dijelaskan mengenai nilai- nilai esensial hubungan internasional di abad-21 untuk mencapai cita- cita dunia. Nilai- nilai tersebut seperti kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, menghormati alam, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, dalam rangka mengartikan nilai- nilai tersebut menjadi sebuah tindakan yang kongkret, PBB telah mengidentifikasi beberapa tindakan, seperti: (1) perdamaian, keamanan dan pelucutan senjata; (2) melaksanakan pembangunan dan pengurangan kemiskinan; (3) melindungi lingkungan; (4) menghormati hak asasi manusia, demokrasi dan menyelenggarakan *good governance*; (5) perlindungan terhadap masyarakat yang lemah; (6) memenuhi kebutuhan khusus bagi negara- negara di benua Afrika; dan (7) memperkuat PBB.⁴²

Secara sederhana, para pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan martabat manusia, kesetaraan dan kesamaan untuk semua masyarakat, khususnya anak- anak dan perempuan. Di antara tujuan- tujuan yang mendukung perdamaian, keamanan dan pelucutan senjata, para pemimpin negara memutuskan untuk memperkuat peraturan undang- undang dan memastikan pemenuhan keputusan dari Pengadilan Internasional. Hal ini dilakukan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan PBB dalam mencegah konflik, menyelesaikan sengketa secara damai, dan mengatasi *drug trafficking* serta terorisme. Dokumen tersebut juga meminta negara- negara anggota untuk menghapus senjata pemusnah masal, khususnya senjata nuklir, termasuk kemungkinan untuk

⁴² United Nations. (n.d.). Millennium Summit (6-8 September 2000). Retrieved November 27, 2017, from http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml

mengadakan konferensi internasional terkait mengidentifikasi cara- cara menghilangkan bahaya nuklir. Selain itu, para pemimpin dunia juga membuat komitmen untuk meminimalkan dampak buruk dari sanksi ekonomi serta memutuskan untuk menerapkan etika konservasi lingkungan dan penatalayanan yang baru.⁴³

Dalam piagam itu disepakati pula sebuah kebijakan dan langkah global dalam menjalankan pembangunan, yaitu Agenda Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/ MDGs*). Agenda tersebut merupakan agenda pembangunan global yang disepakati negara- negara anggota PBB pada tanggal 18 September 2000 sebagai langkah untuk menjawab tantangan dari globalisasi agar menjadi sebuah dorongan positif bagi masyarakat secara menyeluruh. Dalam agenda ini, 189 negara telah berkomitmen penuh untuk mengurangi kemiskinan di segala aspek kehidupan pada tahun 2015 dengan menjalankan pembangunan nasional yang mengacu pada MDGs, sebagai agenda pembangunan global yang diyakini mampu mengatasi tantangan di era-globalisasi ini, seperti kemiskinan dan kesenjangan.

Dengan melihat kembali nilai dan langkah- langkah tersebut, maka dalam MDGs telah disepakati delapan tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu 15 tahun. Berikut merupakan delapan hal yang menjadi tujuan dalam MDGs:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Tujuan utama dalam sebuah agenda pembangunan global adalah menurunkan proporsi kemiskinan global sebesar 50% di tahun 2015 dibandingkan tahun 1990. Dalam hal ini, kemiskinan diartikan ketika masyarakat memiliki pendapatan kurang dari \$1.25 sehari. Selain itu, dalam tujuan ini juga memiliki target untuk menurunkan proporsi penduduk yang menderita

⁴³ Ibid.

kelaparan menjadi setengahnya di tahun 2015 dibandingkan tahun 1990.

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Pendidikan sangatlah penting bagi masa depan suatu negara. Kesuksesan suatu negara dapat ditentukan dari seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, dalam tujuan ini, PBB memiliki target untuk memastikan di tahun 2015 semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Sehingga, semua anak yang merupakan agen pembangunan masa depan mampu menyiapkan dan menjalankan pembangunan dengan lebih baik.

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kesetaraan gender merupakan permasalahan yang sudah terjadi dari masa lalu. *Stereotype* terhadap kaum perempuan yang dianggap bukan sebagai tandingan kaum laki-laki telah merendahkan derajat perempuan. Sehingga terdapat perbedaan dalam pemberian hak dan kewajiban. Kaum perempuan cenderung mengalami penindasan dan diskriminasi, khususnya pada pendidikan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005 serta di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Selain itu, ketimpangan gender perlu dihilangkan pada tatanan pemerintah, seperti dalam rasio pejabat perwakilan rakyat yang lebih adil dan proporsional.

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Anak- anak merupakan generasi penerus bangsa. Harapan yang besar selalu diberikan kepada anak- anak agar dapat menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Namun, impian itu akan sirna ketika angka kematian anak meningkat, khususnya di Afrika. Oleh sebab itu, PBB menerapkan berbagai upaya seperti mengencangkan promosi akan hidup sehat, imunisasi masal, pembagian susu gratis dan lain- lain agar mampu menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiga di tahun 2015 dibandingkan tahun 1990.

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Ibu menjadi salah satu agen utama dalam pembangunan masyarakat, - terkait tujuan nomor empat-. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya di tahun 2015 dibandingkan tahun 1990 menjadi target PBB untuk meningkatkan kesehatan ibu. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti peningkatan tenaga medis yang terlatih dan penyuluhan alat kontrasepsi.

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Salah satu penyebab kegagalan negara dalam meraih kesejahteraan yaitu ketika angka kesehatan masyarakat di negara tersebut rendah. Hal ini sering terjadi di negara- negara di benua Afrika yang sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sebab itulah negara- negara tersebut menjadi

negara tertinggi yang menjadi korban HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, penyakit Malaria dan penyakit menular lainnya pada tahun 2015.

7. Memastikan Kelestarian Lingkungna Hidup

Lingkungan merupakan aspek utama dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting ketika sebuah pembangunan menghargai kelestarian alam. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Selain itu, kaitanya dengan lingkungan, sangat perlu untuk meningkatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan dasar – seperti air dan tempat tinggal-bagi masyarakat. Pemimpin negara berharap agar dapat mencapai target penurunan sebesar 50% proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar di tahun 2015 dan mencapai perbaikan kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

8. Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan

Untuk menciptakan sebuah pembangunan global yang sukses, sangat dibutuhkan kerja sama antara negara-negara dalam mengatasi tantangan pembangunan. Oleh karena itu, sangat dirasa perlu untuk meningkatkan kerja sama antar negara dalam mengatasi permasalahan pembangunan, baik secara bilateral maupun multilateral. Berbagai

kerja sama untuk mencapai kesejahteraan pembangunan perlu dilaksanakan seperti, memberikan perhatian khusus terhadap negara-negara kurang berkembang, negara-negara terpencil dan negara kepulauan yang sedang berkembang, mengatur pengurangan hutang dan meningkatkan ODA (*Official development Assistance*), menciptakan lapangan kerja produktif bagi penduduk usia muda, menyediakan obat-obatan yang murah dan terjangkau serta menyebarkan manfaat dari teknologi-teknologi baru.⁴⁴

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat mengantarkan dunia menjadi lebih sejahtera dalam kurun waktu 15 tahun. Delapan tujuan pembangunan tersebut disepakati dengan didasarkan pada pemenuhan hak dasar warga negara (*right based approach*) - hak dasar atau hak asasi manusia (*human right*) - yang bersifat universal, legal dan berlaku sama bagi setiap warga negara. Hak dasar ini merupakan suatu konsep etika politik dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan rasa kemanusiaan. Prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara ini memberikan implikasi bahwa negara, bahkan dunia internasional, mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya.⁴⁵

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*

MDGs telah diadungkan sebagai agenda pembangunan global yang sukses. PBB menegaskan bahwa MDGs merupakan sebuah gerakan anti kemiskinan paling sukses sepanjang

⁴⁴ United Nations. (2000). *United Nations Millennium Declaration* (Vol. A/RES/55/2). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0005>

⁴⁵ Apriwan. (2011). Millennium Development Goals : Sebuah Analisa Etis dalam Perspektif dan Praksis. *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 1, 106–114. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1124>

sejarah.⁴⁶ Hampir seluruh target- target dalam setiap tujuan MDGs dapat dicapai dengan baik, terutama pada pengurangan angka kemiskinan global yang menjadi fokus utama dalam agenda tersebut. Angka kemiskinan global telah berkurang dari 1.9 miliar di tahun 1990 menjadi 836 juta di tahun 2015.⁴⁷

Namun sayangnya, agenda pembangunan tersebut belum mampu mendapat predikat pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kunci dari aspek keberlanjutan adalah pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang holistik dan dijalankan secara seimbang. Meskipun dalam MDGs telah menerapkan hal itu, namun nampaknya dimensi lingkungan masih kurang diperhatikan.

Hal ini menjadi sebuah keresahan bagi para pemimpin dunia untuk segera mencari cara untuk menyelenggarakan agenda pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk mengakhiri kemiskinan, diperlukan strategi yang dapat membangun pertumbuhan ekonomi, menangani berbagai kebutuhan sosial - seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja - yang diiringi dengan penanganan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

Berbagai pertemuan dan laporan penting mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mencari titik temu antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dari waktu ke waktu semakin giat dilaksanakan. Pada tahun 2012, PBB mengadakan sebuah konferensi yang menggemakan kembali konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama kali dicetuskan dalam laporan *Brundtland* tahun 1987. KTT RIO 2012 atau Rio +20 merupakan Konferensi PBB tentang

⁴⁶ n.n. (2015). Where the Millennium Development Goals a success? Yes! Sort of. Retrieved from <http://www.wvi.org/united-nations-and-global-engagement/article/were-mdgs-success>

⁴⁷ Galatsidas, A., & Sheehy, & F. (2016). What have the millennium development goals achieved? Retrieved September 26, 2017, from <http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jul/06/what-millennium-development-goals-achieved-mdgs>

pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PBB sebagai bentuk dari tindak lanjut atas KTT Bumi tahun 1992. Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 20- 22 Juni 2012.⁴⁸

Rio +20 merupakan sebuah tonggak penting dalam rangkaian konferensi PBB yang bertemakan lingkungan, dimana KTT Bumi yang diselenggarakan pada tahun 1992 lalu menjadi sebuah titik awal diprioritaskannya pembangunan berkelanjutan dalam agenda PBB dan komunitas internasional. Konferensi ini memiliki tiga tujuan, yaitu (1) memperbaharui komitmen politik atas pembangunan berkelanjutan; (2) mengidentifikasi kesenjangan antara progres kemajuan dan implementasi dalam mencapai komitmen- komitmen lama yang telah disetujui; serta (3) mengatasi berbagai tantangan baru yang terus berkembang.⁴⁹

Dalam KTT tersebut juga disepakati sebuah dokumen yang diberi nama “*The Future We Want*”. Dalam dokumen tersebut terdapat tiga isu utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: *Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*; pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (*Institutional Framework for Sustainable Development*); serta kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Framework for Action and Means of Implementation*).⁵⁰

Terkait tindak lanjut KTT Rio +20, di tahun 2015 negara- negara anggota PBB menyepakati agenda pembangunan global yang baru. Agenda tersebut ialah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disusun untuk menyelesaikan target- target MDGs

⁴⁸ Kartakusuma, D. A. (2012). Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): “Masa Depan Yang Kita Inginkan.” Retrieved from <http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/>

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

yang belum tercapai, sekaligus menjadi arah pembangunan global baru bagi negara- negara anggota PBB dalam melaksanakan pembangunan nasional.⁵¹ Dalam agenda ini pula terdapat tujuan- tujuan baru dalam melaksanakan pembangunan yang diserukan bersama oleh para pemimpin negara. SDGs bertujuan bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat saja, namun sekaligus untuk melindungi planet dari kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan salah satu hal yang membedakan SDGs dengan MDGs.

Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang sangat penting dalam pelaksanaan SDGs. Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya bersama dalam membangun masa depan yang inklusif dan tangguh untuk masyarakat dan planet. Agar pembangunan tersebut dapat tercapai, maka formula yang disusun haruslah menyelaraskan tiga elemen inti dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan global, diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan merata; mengurangi ketidaksetaraan; meningkatkan standar kehidupan dasar; mendorong pengembangan sosial yang inklusif dan setara; dan mempromosikan pengelolaan sumber daya dan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan serta melindungi sumber daya alam dan ekosistem yang sering dieksploitasi dan dirusak ketika pembangunan berlangsung.⁵² Jika sebelumnya MDGs cenderung hanya melingkupi pemenuhan hak dasar warga negara, dalam hal ini, SDGs lebih

⁵¹ United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, *16301*(October), 1–35.

⁵² Matthew, R., & Hammill, A. (2009). Sustainable development and climate change. *Climate Change Research - Evaluation and Policy Implications, Proceedings of the International Climate Change Research Conference*, 85(6), 55–66. Retrieved from <http://www.sciencedirect.com/science/article/B8GXY-4P12FG0-8/2/5bc9ba4e5343f8c5e2f0b33521b113c0%5Cnhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166111606801949>

memperluas dimensi lingkungan agar tercipta pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Pendekatan baru ini ditujukan agar dapat mencapai ke-17 tujuan SDGs yang diperinci dalam 169 target yang akan dicapai di tahun 2030. Tujuan- tujuan tersebut diantaranya yaitu:

1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang lapang dan produktif dan layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang kuat, menggalakkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketidaksamaan dalam negara dan di antara negara- negara lain;
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan;
12. Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil langkah mendesak untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melindungi dan menggunakan samudra, laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem darat (terrestrial), pengelolaan hutan- hutan yang berkelanjutan, melawan penggurunan, menghentikan dan merehabilitasi degradasi lahan serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;

16. Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi- institusi yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat cara implemenstasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.⁵³

Berbagai dukungan dan semangat baru dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut disuarakan dari berbagai pihak. Mereka percaya bahwa SDGs mampu menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia dengan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Antonio Guterres, selaku Sekretaris Jendral PBB periode 2017- 2021, sangat mendukung penuh adanya SDGs, yang telah menguraikan secara universal, mengintegrasikan dan mentransformasikan cita- cita dunia menuju sebuah dunia yang lebih baik.⁵⁴ Agenda tersebut akan menjadi sebuah batu loncatan dari sebuah agenda pembangunan baru yang dapat menata dunia ke dalam sebuah aksi untuk mengakhiri kemiskinan dan mengubah hidup menjadi lebih baik serta melindungi planet. Tujuan- tujuan dalam SDGs menjelaskan bagaimana negara- negara bekerja sama untuk mempromosikan martabat, kesetaraan, keadilan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan bagi semua orang, sekaligus melindungi lingkungan.⁵⁵

⁵³ Ibid.

⁵⁴ United Nations. (2017). Antonio Gutterres and The Sustainable Development Goals. Retrieved September 29, 2017, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/secretary-general/>

⁵⁵ Pedersen, A. (2015). From MDGs to SDGs: Botswana can lead again. Retrieved September 29, 2017, from <http://www.dailynews.gov.bw/news-details.php?nid=23343>

Para pemimpin negara dan pemerintahan menyadari bahwa untuk mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan, sangat diperlukan dukungan dari semua pihak. Untuk itu akan dilakukan upaya terobosan untuk mengurangi kesenjangan antara negara- negara maju dan berkembang. Negara berkembang perlu diberi kesempatan untuk membangun berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.⁵⁶

Mencapai kesuksesan dalam meraih tujuan SDGs merupakan tanggung jawab semua negara dan masyarakat dalam mendukung agenda tersebut. Partisipasi publik yang lebih luas sangat dibutuhkan untuk menciptakan pembangunan yang holistik. Sebab, tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama seperti MDGs. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk panitia bersama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil dengan keahliannya masing- masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi dan implementasi serta melakukan pengawasan.⁵⁷

Terlebih lagi, agenda pembangunan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua negara, berbeda dengan MDGs cenderung hanya ditujukan untuk negara- negara berkembang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam SDGs adalah dimensi lingkungan yang menjadi sorotan baru dalam agenda pembangunan ini. Penaksiran terkait lingkungan dalam setiap rancangan sebuah kebijakan akan menciptakan kebijakan yang menguntungkan secara esensial.⁵⁸ Mengingat dimensi

⁵⁶ Sihombing, L. (2012). Green Economy dan Konferensi Tingkat Tinggi Rio + 20. *Info Singkat Hubungan Internasional*, IV(12).

⁵⁷ Sedayu, A. (2015). Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Butuh Peran Publik. Retrieved September 29, 2017, from <https://nasional.tempo.co/read/703630/program-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-butuh-peran-publik>

⁵⁸ Schild, A., & Sharma, E. (2011). Sustainable Mountain Development Revisited. *Mountain Research and Development*, 31(3), 237–241. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00069.1>

lingkungan dalam MDGs belum begitu diperhatikan dalam pelaksanaannya walaupun telah disepakati menjadi tujuan MDGs yang ke tujuh. Kali ini dalam SDGs, lingkungan telah menjadi dimensi yang sangat penting baik untuk keberlangsungan politik maupun sosial.⁵⁹

Meningkatnya kesadaran akan lingkungan menjadi fokus utama dalam SDGs. Permasalahan perubahan iklim dalam agenda ini telah mendapatkan perhatian yang khusus bagi negara-negara anggota PBB. Permasalahan lingkungan ini memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Perubahan iklim sudah berdampak pada kesehatan masyarakat, keamanan pangan dan air, migrasi, perdamaian dan keamanan. Perubahan iklim yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir ini hilang begitu saja. Oleh karena itu, menangani perubahan iklim sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini menjadikan dimensi lingkungan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan yang dikolaborasikan dan diseimbangkan dengan dua dimensi yang lain – sosial dan ekonomi - untuk mengurangi kemiskinan secara menyeluruh, seperti yang disampaikan dalam deklarasi PBB terkait SDGs. Kombinasi ketiga dimensi tersebut diharapkan mampu menciptakan sebuah agenda pembangunan yang mampu menyejahterakan masyarakat dan planet secara berkelanjutan.

Namun ada beberapa hal yang perlu diingat, banyaknya tujuan yang akan dicapai dalam SDGs, diperlukan investasi yang besar baik di negara maju maupun negara berkembang. Agenda ini akan memerlukan mobilisasi sumber daya yang besar, khususnya dana yang berlipat dari pada MDGs. Hal ini

⁵⁹ Byfield, J. (2012). Gender, Justice, and the Environment: Connecting the Dots. *African Studies Review*, 55(1), 1–12. <https://doi.org/10.1353/arw.2012.0017>

dilakukan mengingat banyaknya tujuan dalam SDGs yang banyak dan membutuhkan biaya yang banyak pula.⁶⁰

⁶⁰ United Nations. (2017). The Sustainable Development Agenda. Retrieved November 27, 2017, from <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>